

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang Tahun 2024 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan selama tahun 2024 akan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.01/2014 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi dan Kode Laporan Rutin di Direktorat Jenderal Pajak.

Tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menggembirakan untuk KPP Pratama Surabaya Karangpilang karena aktivitas perekonomian di tiga kecamatan yang menjadi wilayah kerja KPP Surabaya Karangpilang berkembang dengan bagus.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebesar 108,13. Nilai indeks capaian tersebut didapatkan dari indeks capaian masing-masing perspektif yaitu, *Stakeholder Perspective* sebesar 98,27, *Customer Perspective* sebesar 91,62, *Internal Process Perspective* sebesar 116,74, dan *Learning and Growth Perspective* sebesar 115,76

Menjalankan fungsi sebagai institusi penghimpun penerimaan negara, pada tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Karangpilang berhasil mengumpulkan penerimaan pajak Rp 2.008.181.586.676,00. Capaian tersebut setara dengan 100,66% dari target penerimaan tahun 2024.

LAKIN ini dibuat untuk memberikan gambaran yang transparan dan jelas atas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kinerja

instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024.

Surabaya, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Chr. Erwin Priyambodo D. P.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
B. TARGET YANG DIBERIKAN.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
1. VISI.....	7
2. MISI.....	8
3. TUJUAN DAN SASARAN.....	8
B. KONTRAK KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. ANALISIS KINERJA.....	11
B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN.....	13
C. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA.....	17
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	18
1. PENDAPATAN KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	18
2. BELANJA KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG.....	18
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Wiyung, Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Karangpilang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang mengemban tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang menyelenggarakan fungsi :

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencahutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;

- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI;
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

B. TARGET YANG DIBERIKAN

Berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran utama, mandat yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.994.966.067.000,00.

Dengan rincian rencana penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp 789.245.824.000,00, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp 1.205.514.865.000,00 , dan Pajak lainnya Rp 205.378.000,00.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pengukuran kinerja instansi Pemerintah merupakan proses secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program instansi, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

1. VISI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Ditjen Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Ditjen Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”* dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: *“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.”*

2. MISI

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Pajak yang dituangkan dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, yaitu pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; penerimaan negara yang optimal; dan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Dalam usaha mencapai tujuan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga tax ratio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin baik. Tax Ratio juga dapat mengindikasikan keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dalam proses pemungutan pajak. Pada akhirnya sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 2.008.181.586.676,00,00.

B. KONTRAK KINERJA

Kontrak kinerja dibuat sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja 2024 dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada meliputi SDM, sarana dan prasarana serta dana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penetapan kinerja ini telah ditetapkan pula sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja, serta target indikator kinerja.

Sasaran Strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (bersifat *output/outcome*), atau apa yang ingin dilakukan (bersifat proses), atau yang seharusnya dimiliki (bersifat input).

Untuk mengetahui pencapaian sasaran, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Sesuai penetapan kinerja yang telah disusun maka sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja, serta target dapat dirinci sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%

Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS KINERJA

Keberhasilan dan kegagalan kegiatan masing-masing program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang selama tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,27
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,27
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,66%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,66
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	95,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,61
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,10
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,69%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,69
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	111,14%	Max	P/L	19,00%	42,22%	111,14
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,12
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,12%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,12
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,99
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	113,98%	Max	E/M	21,00%	50,00%	113,98
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,38%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,72
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,16%	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,16
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	109,98%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							115,29
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%	111,82
	Learning & Growth Perspective						25,00%	115,79
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,57
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,02	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,02
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,66	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,19
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,78	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,53
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							108,13

Pencapaian Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2024 secara umum tercapai dengan baik atau berstatus hijau dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,13. Dari 10 sasaran strategis dan 20 IKU terdapat 19 IKU berstatus hijau, satu IKU berstatus Kuning, namun demikian masih dapat disimpulkan bahwa kinerja KPP Pratama Surabaya Karangpilang selama tahun 2024 telah tercapai secara optimal.

B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN

Capaian kinerja penerimaan pada tahun 2024 adalah sebesar 100.66 % atau sebesar Rp 2.008.181.586.676,00. Analisa yang dapat disampaikan terkait capaian kinerja penerimaan tahun 2024 tersebut antara lain:

1. Secara keseluruhan penerimaan pajak yang diraih KPP Pratama Surabaya Karangpilang pada tahun 2024 sebesar 100.66 % dari target yang ditetapkan. Dari segi pertumbuhan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 50,39% dibandingkan tahun lalu meskipun tidak seluruh jenis pajak mengalami pertumbuhan.
2. Penerimaan dari Pajak Penghasilan selama tahun 2024 sebesar Rp 813.018.027.467,00 atau tercapai 103.01% dari target.
3. Penerimaan PPN dan PPnBM selama tahun 2024 sebesar Rp. 1.194.947.133.209,00 tercapai 99,12 % dari target dan tumbuh sebesar 104,00 % dari tahun 2023.
4. Pajak lainnya yang selama ini diperoleh dari Bea Meterai selama tahun 2024 sebesar Rp. 216.426.000 atau mengalami pertumbuhan negative sebesar 9,68% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah)

URAIAN	TARGET	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	789,245,824,000	813,018,027,467	1,209,444,757,158	103.01%	-32.78%
1. PPh NON MIGAS	789,245,824,000	813,018,027,467	1,209,441,609,328	103.01%	-32.78%
1.1 PPh Pasal 21	181,270,399,000	181,651,684,546	107,767,380,765	100.21%	68.56%
1.2 PPh Pasal 22	25,548,347,000	21,924,554,251	23,266,719,225	85.82%	-5.77%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	54,735,497,000	53,303,630,697	46,320,407,273	97.38%	15.08%
1.4 PPh Pasal 23	36,916,390,000	32,256,125,660	24,536,739,549	87.38%	31.46%
1.5 PPh Pasal 25/29				99.96%	28.06%

OP	96,962,071,000	96,928,061,180	75,687,112,042		
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	96,823,166,000	148,723,621,472	74,871,644,884	153.60%	98.64%
1.7 PPh Pasal 26	2,796,743,000	3,289,672,049	1,537,791,167	117.63%	113.92%
1.8 PPh Final	294,193,211,000	274,940,677,612	855,453,814,423	93.46%	-67.86%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri			-	0.00%	0.00%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	-		-	0.00%	0.00%
2. PPh MIGAS	-		3,147,830	0.00%	-100.00%
2.1 PPh Minyak Bumi	-		-	0.00%	0.00%
2.2 PPh Gas Alam	-	-	3,147,830	0.00%	-100.00%
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-	-	0.00%	0.00%
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-		-	0.00%	0.00%
B. PPN dan PPnBM	1,205,514,865,000	1,194,947,133,209	585,768,807,181	99.12%	104.00%
1. PPN Dalam Negeri	1,048,559,484,000	1,021,448,629,274	468,987,688,798	97.41%	117.80%
2. PPN Impor	156,469,979,000	173,437,732,287	111,663,854,000	110.84%	55.32%
3. PPnBM Dalam Negeri	482,464,000	57,220,398	69,379,072	11.86%	-17.52%
4. PPnBM Impor			-	0.00%	0.00%
5. PPN Lainnya	2,938,000	3,551,250	20,277,462	120.87%	-82.49%
6. PPnBM Lainnya	-		-	0.00%	0.00%
7. PPN DN DTP	-		5,027,607,849	0.00%	-100.00%
8. PPNBM DTP	-	-	-	0.00%	0.00%
C. PBB dan BPHTB	-	-	-	0.00%	0.00%
1. Pendapatan PBB	-	-	-	0.00%	0.00%
a. PBB Perdesaan	-	-	-	0.00%	0.00%
b. PBB Perkotaan	-	-	-	0.00%	0.00%
c. PBB Perkebunan	-	-	-	0.00%	0.00%
d. PBB Kehutanan				0.00%	0.00%

	-	-	-		
e. PBB Pertambangan Minerba	-	-	-	0.00%	0.00%
f. PBB Migas	-	-	-	0.00%	0.00%
g. PBB Pertambangan	-	-	-	0.00%	0.00%
h. PBB lainnya	-	-	-	0.00%	0.00%
2. Pendapatan BPHTB	-	-	-	0.00%	0.00%
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	4,827,860,395	0.00%	-100.00%
1. PPh Pasal 21	-	-	2,214,572,563	0.00%	-100.00%
2. PPh Pasal 22	-	-	-	0.00%	0.00%
3. PPh pasal 22 Impor	-	-	-	0.00%	0.00%
4. PPh Pasal 23	-	-	-	0.00%	0.00%
5. PPh Pasal 25/29 OP	-	-	-	0.00%	0.00%
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	-	0.00%	0.00%
7. PPh Pasal 26	-	-	-	0.00%	0.00%
8. PPh Final	-	-	2,613,287,832	0.00%	-100.00%
9. PPh Non Migas lainnya DTP	-	-	-	0.00%	0.00%
JUMLAH D	-	-	4,827,860,395	0.00%	-100.00%
E. Pajak Lainnya	205,378,000	216,426,000	239,611,400	105.38%	-9.68%
1. Bea Meterai	205,378,000	216,426,000	239,611,400	105.38%	-9.68%
2. Penjualan Benda Meterai	-	-	-	0.00%	0.00%
3. PTLL	-	-	-	0.00%	0.00%
4. Bunga Penagihan PPh	-	-	-	0.00%	0.00%
5. Bunga Penagihan PPN	-	-	-	0.00%	0.00%
6. Bunga Penagihan PPnBM	-	-	-	0.00%	0.00%
7. Bunga Penagihan PTLL	-	-	-	0.00%	0.00%

8. PIB	-	-	-	0.00%	0.00%
9. PPN Batu Bara	-	-	-	0.00%	0.00%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1,994,966,067,000	2,008,181,586,676	1,800,281,036,134	100.66%	11.55%

*data Apportal 29 Januari 2025

Tabel 2
Capaian Penerimaan 5 Tahun Terakhir
(dalam rupiah)

No	Tahun	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2024	1.994.966.067.000	2.008.181.586.676	100,66
2	2023	1.222.186.036.000	1.322.423.666.088	108,20
3	2022	1.568.246.681.000	1.826.081.303.593	116,48
4	2021	1.099.621.644.000	1.046.030.102.120	95,13
5	2020	1.113.883.586.000	1.077.646.429.305	96,75

Tabel 3
Capaian Penerimaan KPP Tahun 2024
Dibandingkan dengan Kanwil dan DJP secara Nasional
(dalam rupiah)

No	LINGKUP	TARGET	NETTO	BRUTO LALU	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN BRUTO	PERTUMBUHAN NETTO
1	Nasional	1,921,943,100,000,000	1,930,811,632,251,830	2,091,496,086,392,750	1,867,826,614,885,040	100.46%	5.02%	3.37%
2	Kanwil Jatim I	54,088,085,245,000	54,140,176,151,149	52,828,107,483,757	50,398,429,756,617	100.10%	8.38%	7.42%
3	Karangpilang	1,994,966,067,000	2,008,181,586,676	1,387,880,345,140	1,335,339,856,285	100.66%	59.60%	50.39%

C. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA

Selama tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Karangpilang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja seperti yang tertuang pada kontrak kinerja dengan melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Mengoptimalkan fungsi Komite Kepatuhan
2. Menerbitkan SP2DK berdasarkan data potensi internal maupun eksternal;
3. Sosialisasi untuk mendorong Wajib Pajak untuk mengikuti program PPS;
4. Memaksimalkan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan data konkret (P3);
5. Melaksanakan forum *Account Representative* secara periodik;
6. Mengoptimalkan pemenuhan kewajiban PPh Final pengalihan hak tanah dan/atau bangunan melalui penelitian material oleh fungsional penilai;
7. Melakukan lelang aset Wajib Pajak seperti rumah, ruko, dan mobil;
8. Mengundang 200 Wajib Pajak yang baru saja diterbitkan SKP;
9. Mengirim SMS dan *email blast* kepada Wajib Pajak untuk mengingatkan lapor SPT Tahunan;
10. Memaksimalkan pelayanan secara daring kepada Wajib Pajak;
11. Membentuk Tim Pengamanan IKU Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan;
12. Mengadakan penyuluhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak yang baru terdaftar;
13. Mengadakan *Business Development Service* terhadap Wajib Pajak UMKM dengan bekerja sama dengan dinas dan instansi terkait;
14. Menghimbau Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya;
15. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak baru

Atas upaya yang telah dilakukan tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan KPP Pratama Surabaya Karangpilang dalam mencapai bahkan melampaui target yang ditentukan, yaitu:

1. Peningkatan penerimaan sektor PPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
2. Peningkatan penerimaan sektor PPN/PPn BM

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. PENDAPATAN KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Komposisi realisasi anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
1	Penerimaan Perpajakan	1.994.966.067.000	2.008.181.586.676	100,66
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pajak dan PNBP	1.994.966.067.000	2.008.181.586.676	100,66

2. BELANJA KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

Belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang terdiri dari (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang; dan (3) Pembayaran Bunga Utang. Komposisi realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	797.482.000	753.455.000	94.48%
2.	Belanja Barang	5,529,317,000	5,482,530,846	99.15%
3.	Belanja Modal	549,381,000	548,726,640	99.88%
4.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	0	0
Jumlah		6,876,180,000	6,784,712,486.00	98.67%

Tabel 6
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja
TA 2024 dan TA 2023
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	TA 2024		TA 2023	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1.	Belanja Pegawai	797.482.000	753.455.000	792.309.000	776.860.000
2.	Belanja Barang	5,529,317,000	5,482,530,846	5.228.400.000	5.219.152.085
3.	Belanja Modal	549,381,000	548,726,640	0	0
4.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	0	0	0
Jumlah		6,876,180,000	6,784,712,486.00	6.020.709.000	5.996.012.085

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 6,784,712,486.00 atau 98.67% dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 788.700.401,00, namun secara total DIPA tahun 2024 dibanding tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 855.471.000,00.

Kenaikan ini secara akumulasi disebabkan oleh :

1. Kenaikan pagu belanja pegawai dikarenakan kenaikan tarif uang lembur pegawai.
2. Terdapat beberapa pegawai mutasi keluar
3. Peningkatan pagu belanja modal memanfaatkan harmonisasi penyerapan anggaran satker lain dalam satu kanwil

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu upaya memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan setiap program kerja yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran dari tujuan suatu instansi pemerintah secara jelas dan transparan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang pada tahun 2024 pada dasarnya telah berhasil mencapai seluruh sasaran tersebut, bahkan mampu melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dengan tersusunnya LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang Tahun 2024 ini, diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang terkait dengan laporan ini. Perbaikan sangat diperlukan dan diharapkan untuk lebih mengoptimalkan dan mempertahankan capaian penerimaan pajak di tahun mendatang.

Surabaya, 30 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Chr. Erwin Priyambodo D. P.